

LAMPIRAN XX
PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025



RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Veteran No. 70 Eks. Lap. Poliko
Telp (0752) 92601, 92957 Fax (0752) 93279
Payakumbuh



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat;
- b. bahwa rencana kerja perangkat daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
8. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran RKPD Tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 3

Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub-kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan RKPD Tahun 2025 yang bersifat indikatif.

Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023;
 - c. bab III memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. bab V memuat penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. dinas pendidikan;
 - b. dinas kesehatan;
 - c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 - f. badan penanggulangan bencana daerah;
 - g. dinas sosial;
 - h. dinas tenaga kerja dan perindustrian;
 - i. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - j. dinas ketahanan pangan;
 - k. dinas lingkungan hidup;
 - l. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. dinas perhubungan;
 - n. dinas komunikasi dan informatika;
 - o. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - p. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - q. dinas pariwisata, pemuda dan olah raga;
 - r. dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - s. dinas pertanian;
 - t. sekretariat daerah;
 - u. sekretariat dprd;
 - v. badan perencanaan pembangunan daerah;
 - w. badan keuangan daerah;
 - x. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - y. inspektorat;
 - z. kecamatan payakumbuh utara;
 - aa. kecamatan payakumbuh barat;
 - bb. kecamatan payakumbuh timur;
 - cc. kecamatan payakumbuh selatan;
 - dd. kecamatan lamposi tigo nagori; dan
 - ee. kantor kesbangpol.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila dalam pelaksanaan RKPD mengalami perubahan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,



SUPRAYITNO

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024 NOMOR 13

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023.....	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah.....	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah.....	II-20
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....	II-29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III-2
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	III-2
3.3. Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	III-2
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	IV-1
BAB V PENUTUP.....	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	:	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Payakumbuh.....	II-2
Tabel 2.2	:	Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023.....	II-8
Tabel 2.3	:	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-19
Tabel 2.4	:	Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025.....	II-30
Tabel 2.5	:	Persandingan Daftar Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2024 Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.....	II-39
Tabel 2.6	:	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025.....	II-40
Tabel 3.1	:	Interkoneksi Prioritas Daerah Kota Payakumbuh dengan Prioritas Nasional.....	III-1
Tabel 3.2	:	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2024 Sumber Dana APBD Kota Payakumbuh.	III-6
Tabel 4.1	:	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2025.....	IV-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah tahun ke-tiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Payakumbuh, yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Kota Payakumbuh serta berdasarkan pertimbangan terhadap hasil evaluasi akhir periode RPJMD tahun 2017-2022, dokumen ini juga dijadikan sebagai instrumen dalam mewujudkan muatan-muatan yang terkandung pada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Perencanaan dilaksanakan secara spesifik, terukur, didukung ketersediaan sumber daya, tepat waktu penyelesaiannya dan menyeimbangkan asas bottom up dan top down.

Sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya RKPD Tahun 2025, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan mengacu kepada RKPD.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan dan sasaran prioritas serta dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
- c. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja Satuan Perangkat Daerah pada tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan Penyusunan Rencana Kerja. Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan.

Pada Tahun 2025, terdapat dua peristiwa besar berskala nasional dan global yang akan memberi warna terhadap muatan RKPD, yaitu rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota. Kondisi lain yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2024, adalah tantangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, yang secara langsung akan berdampak pada perkembangan perekonomian Indonesia yang termasuk di dalamnya adalah Kota Payakumbuh.

Sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yaitu membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, maka dari peristiwa besar berskala global pada tahun 2024 diatas, Sekretariat Daerah juga ikut andil baik secara langsung maupun tak langsung dalam agenda tersebut. Bentuk keterlibatan Sekteraiat Daerah antara lain adalah membantu Pimpinan dalam penyusunan kebijakan, evaluasi dan pemantauan kelancaran jalannya Pemilu Tahun 2024 serta pengentasan Kemiskinan Ekstrim dan *Stunting* karena tantangan ekonomi global yang berdampak pada perekonomian daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Satuan Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 57);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 62)
22. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 3);

23. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 6);
24. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh adalah :

1. Memberikan fokus kerja organisasi dan pelayanan yang lebih diarahkan pada mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Sebagai pedoman bagi Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama periode 1 (satu) tahun anggaran.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah adalah :

1. Mewujudkan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan;
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat Daerah;
3. Meningkatkan pelayanan Masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Lalu

- 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
- 2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah

BAB V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023 berguna untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana kerja Sekretariat Daerah apakah sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dan menjadi pertimbangan untuk pelaksanaannya pada tahun berikutnya serta kemungkinan adanya kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan dilapangan.

Evaluasi rencana kerja difokuskan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Terhadap capaian program yang berkaitan dengan target dari program yang tercantum pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 sudah sesuai dengan target capaian program pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yaitu :

1. Nilai IKM, target 88,41 terealisasi 89,65 dengan capaian sebesar 101%
2. Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, target A terealisasi dengan nilai B dengan capaian sebesar 86,25%

Sebagian besar sudah ditindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat terhadap evaluasi dari dokumen LkjIP Sekretariat Daerah.

3. Nilai LPPD, target 3,1700 terealisasi sebesar 3,3922 dengan capaian 107,01%
4. Indeks Reformasi Hukum, target 75 terealisasi sebesar 67,48 dengan capaian sebesar 89,97%.

Perlu dipelajari lebih lanjut terkait instrumen penilaian terhadap indeks reformasi hukum.

5. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, terget 75 terealisasi sebesar 83,26 dengan capaian 111%

Adapun untuk lebih jelasnya terhadap realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

SEKRETARIAT DAERAH

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahun n)				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2023	
										Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
			4			5		6	7	8	9	10 = 8/6	11 = 9/7	12	13 = 12/4
			K			K		K		K				K	
			unit	satuan	Rp	unit	Rp	unit	Rp	unit	Rp			unit	Rp
	Urusan Pendukung Kesekretariatan Daerah														
	Sekretariat Daerah				20.452.563.087		26.130.693.900		28.767.352.316		26.386.177.187		91,72%		
		Nilai LPPD	3,170	Nilai	20.452.563.087		26.130.693.900	3,1700	28.767.352.316	3,3922	26.386.177.187		91,72%	3,3922	
		Nilai IKM	88,41	Nilai				88,41		89,65				89,65	101%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM	88,41	Nilai	20.450.763.087	12,39	21.647.429.204	88,41	22.833.556.026	89,65	20.790.939.403	101%	91,05%	89,65	101%
		Nilai Evaluasi AKIP SETDAKO oleh Inspektorat	A	Nilai		A		A		B				B	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program/ kegiatan	100	persen	200.000	90	118.578.660	100	134.863.150	100	125.364.880	100%	92,96%	100	100%
		IKM Sekretariat Daerah	87	Nilai		89,98		87		89,91		103%		89,91	103%
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	dokumen	100.000	6	48.564.990	4	58.464.600	4	56.852.220	100%	97,24%	4	100%
2)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	laporan	100.000	4	70.013.670	4	76.398.550	4	68.512.660	100%	89,68%	4	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	90	persen	10.467.318.417	100	9.465.948.045	90	10.185.492.269	50	9.179.430.317	56%	90,12%	50	56%
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84	orang/bulan	9.907.318.417	84	9.465.948.045	84	9.625.323.269	77	8.655.803.397	92%	89,93%	77	92%
2)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	laporan	560.000.000			12	560.169.000	12	523.626.920	100%	93,48%	12	100%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	100	persen	50.000.000	1502	49.817.860	100	50.000.000	100	49.905.300	100%	99,81%	100	100%
1)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen	50.000.000	9	49.817.860	1	50.000.000	1	49.905.300	100%	99,81%	1	100%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	persen	100.000	100	42.930.000	100	50.475.400	100	41.385.240	100%	81,99%	100	100%
1)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	100.000	81	42.930.000	1	50.475.400	0	41.385.240	0%	81,99%	0	0%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum Sekretariat Daerah sesuai standar	100	persen	1.474.600.230	90	3.062.782.125	100	3.229.685.900	100	3.071.845.678	100%	95,11%	100	100%
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	43.378.760	9	43.076.390	1	47.505.800	1	47.498.010	100%	99,98%	1	100%
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	paket	36.054.350	21	225.297.930	1	458.697.220	1	442.620.000	100%	96,50%	1	100%
3)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	paket	34.352.170	49	34.316.750	1	34.251.700	1	34.170.250	100%	99,76%	1	100%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahun n)				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2023	
										Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
			4			5		6	7	8	9	10 = 8/6	11 =9/7		
1	2	3	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			unit	satuan		unit		unit		unit				unit	
4)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	paket	60.714.950	13	60.557.880	1	60.702.160	1	60.657.810	100%	99,93%	1	100%
5)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	dokumen	100.000	21	336.914.550	3	424.139.500	3	347.754.850	100%	81,99%	3	100%
6)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	laporan	550.000.000	100	1.129.444.600	1	931.861.520	1	881.713.506	100%	94,62%	1	100%
7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144	laporan	750.000.000	355	1.233.174.025	144	1.272.528.000	138	1.257.431.252	96%	98,81%	138	96%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	90	persen	50.400.000	90	247.273.500	90	518.738.864	90	509.053.500	100%	98,13%	90	100%
1)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		unit					-		-			0	
2)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	unit	100.000				-		-			0	0%
3)	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	unit	100.000	50	67.000.000		-		-			0	0%
4)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	unit	50.000.000			63	328.500.900	63	327.120.000			63	2100%
5)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	unit	100.000	1	180.273.500	2	132.070.924	2	130.429.500	100%	98,76%	2	100%
6)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	unit	100.000			3	58.167.040	3	51.504.000	100%	88,54%	3	100%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	98	persen	3.328.702.003	90	2.802.826.807	90	2.983.032.853	90	2.799.152.685	100%	93,84%	90	92%
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	19.998.000	1590	18.100.000	12	19.996.250	12	19.571.000	100%	97,87%	12	1200%
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	959.540.000	4	802.114.382	12	989.526.052	12	943.880.686	100%	95,39%	12	1200%
3)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	laporan	170.495.794	100%	329.489.005	1	307.726.700	1	277.222.126	100%	90,09%	1	100%
4)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umun kantor yang disediakan	1	laporan	2.178.668.209	12	1.653.123.420	12	1.665.783.851	12	1.558.478.873	100%	93,56%	12	1200%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90	persen	1.199.040.000	90	1.343.188.373	90	1.333.355.060	90	1.285.068.364	100%	96,38%	90	100%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahun n)				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2023	
										Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
			4			5		6	7	8	9	10 = 8/6	11 =9/7	12	13 = 12/4
1	2	3	K	satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			unit			unit		unit		unit				unit	
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	unit	601.400.000	15	601.392.039	13	478.410.000	13	478.391.475	100%	100,00%	13	87%
2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45	unit	397.650.000	45	448.108.493	45	483.450.000	52	457.418.685	116%	94,62%	52	116%
3)	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	unit	5.400.000	3	29.446.000	10	40.000.000	10	39.622.000	100%	99,06%	10	100%
4)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	unit	19.490.000	10	19.307.375	10	19.490.000	10	19.456.000	100%	99,83%	10	100%
5)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	100.000	3	179.616.866	4	147.075.060	4	128.093.764	100%	87,09%	4	100%
6)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	25.000.000	3	9.978.900	4	25.000.000	4	24.057.280	100%	96,23%	4	100%
7)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	150.000.000	42	55.338.700	4	139.930.000	4	138.029.160	100%	98,64%	4	100%
9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepada KDH dan WKDH	100	persen	655.950.747	100	603.758.738	100	500.031.520	100	479.158.000	100%	95,83%	100	100%
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	orang/bulan	182.469.807	9	135.964.978	1	11.340.000	1	8.090.000	100%		1	50%
2)	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2	paket	68.480.940	18	80.793.760	1	86.191.520	1	85.818.000	100%	99,57%	1	50%
3)	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	orang	5.000.000			2	2.500.000		-	0%	0,00%	0	0%
4)	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	orang/bulan	400.000.000	100	387.000.000	1	400.000.000	1	385.250.000	100%	96,31%	1	50%
10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan baik	100	persen	605.947.020	100	805.919.131	100	635.358.910	100	408.408.957	100%	64,28%	100	100%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1	paket	532.329.900	100	572.183.201	1	540.461.280	1	328.076.143	100%	60,70%	1	100%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	paket	100.000	100	151.031.010		-					0	0%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahun n)				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2023	
										Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
			4			5		6	7	8	9	10 = 8/6	11 = 9/7	12	13 = 12/4
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			unit	satuan		unit		unit		unit				unit	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1	paket	73.517.120	100	82.704.920	1	94.897.630	1	80.332.814	100%	84,65%	1	100%
11	Penataan Organisasi	Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah	39,09	indeks	300.000	39,09	512.984.330	39,09	569.426.250	39,09	564.333.868	100%	99,11%	39,09	100%
1)	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1	dokumen	100.000	2	165.028.750	1	263.429.300	1	262.376.028	100%	99,60%	1	100%
2)	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	laporan	100.000	1	190.391.960	1	186.343.700	1	184.780.310	100%	99,16%	1	100%
3)	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	dokumen	100.000	2	157.563.620	2	119.653.250	2	117.177.530	100%	97,93%	2	100%
12	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik	100	persen	2.618.204.670	100	2.591.421.635	100	2.643.095.850	100	2.277.832.614	100%	86,18%	100	100%
1)	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	laporan	164.996.590	24	157.259.200	12	138.155.710	12	106.804.500	100%	77,31%	12	100%
2)	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	laporan	2.172.708.080	90	2.164.572.435	12	2.172.704.250	12	1.867.811.674	100%	85,97%	12	100%
3)	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	laporan	280.500.000	316	269.590.000	12	332.235.890	12	303.216.440	100%	91,27%	12	100%
II	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	3,170	Nilai	1.100.000	80	3.945.226.370	3,1700	5.365.753.600	3,3922	5.069.196.067		94,47%	3,3922	
		Indeks Reformasi Hukum	75	indeks				72		67,48	-			67,48	
1	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik	100	persen	300.000	100	1.003.406.430	100	1.444.527.230	100	1.402.290.518	100%	97,08%	100	100%
		Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu	100	persen		100		100		100	-	100%		100	100%
1)	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	dokumen	100.000	1	349.418.459	1	666.696.850	1	642.794.773	100%	96,41%	1	100%
2)	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	dokumen	100.000	2	200.434.831	1	351.741.680	1	350.469.795	100%	99,64%	1	100%
3)	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	dokumen	100.000	5	453.553.140	1	426.088.700	1	409.025.950	100%	96,00%	1	100%
2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	100	persen	300.000	80	2.317.556.720	100	3.335.574.730	100	3.226.869.799	100%	96,74%	100	100%
1)	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	dokumen	100.000	12	506.116.200	1	956.318.390	1	899.319.030	100%	94,04%	1	100%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahun n)				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2023	
										Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
			4			5		6	7	8	9	10 = 8/6	11 = 9/7	12	13 = 12/4
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			unit	satuan		unit		unit		unit				unit	
2)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1	dokumen	100.000	1	1.638.904.400	1	2.138.554.700	1	2.102.759.364	100%	98,33%	1	100%
3)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kemudahan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1	dokumen	100.000	2	172.536.120	1	240.701.640	1	224.791.405	100%	93,39%	1	100%
3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	100	persen	300.000	100	437.608.860	100	408.063.970	100	281.177.770	100%	68,91%	100	100%
		Persentase koordinasi hukum yang difasilitasi	100	persen		100		100		100	-	100%		100	100%
1)	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3	dokumen	100.000	2	104.363.920	3	93.359.170	3	86.241.900	100%	92,38%	3	100%
2)	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2	kasus	100.000	8	246.839.460	2	255.253.250	2	136.235.400	100%	53,37%	2	100%
3)	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan produk hukum yang didokumentasikan	3	dokumen	100.000	100	86.405.480	3	59.451.550	3	58.700.470	100%	98,74%	3	100%
4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen Kesepakatan Bersama/ Nota Kesepahaman yang difasilitasi	5	MoU/PKS	200.000	100	186.654.360	5	177.587.670	5	158.857.980	100%	89,45%	5	100%
1)	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1	dokumen	100.000	10	179.745.730	1	170.633.320	1	152.214.980	100%	89,21%	1	100%
2)	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1	laporan	100.000	1	6.908.630	1	6.954.350	1	6.643.000	100%	95,52%	1	100%
III	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	75		700.000	75	538.038.326	75	568.042.690	83,26	526.041.717	111%	92,61%	83,26	111%
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	100	persen	200.000	80	169.130.784	100	195.719.000	100	177.753.327	100%	90,82%	100	100%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahun n)				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2023	
										Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
			4			5		6	7	8	9	10 = 8/6	11 = 9/7	12	13 = 12/4
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			unit	satuan		unit		unit		unit				unit	
1)	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	dokumen	100.000	6	74.807.914	1	79.999.600	1	78.866.870	100%	98,58%	1	100%
2)	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	laporan	100.000	18	94.322.870	1	115.719.400	1	98.886.457	100%	85,45%	1	100%
2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase hasil monitoring evaluasi yang ditindaklanjuti	100	persen	100.000	93	57.631.150	100	62.563.940	100	59.574.550	100%	95,22%	100	100%
1)	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	laporan	100.000	12	57.631.150	12	62.563.940	12	59.574.550	100%	95,22%	12	100%
3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik	100	persen	300.000	100	303.225.072	100	299.760.500	100	279.212.400	100%	93,15%	100	100%
		Jumlah pembinaan dan pendampingan advokasi pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan	4	kali		100		4		4	-	100%		4	100%
1)	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	dokumen	100.000	100	106.933.700	1	26.311.700		24.344.500	0%	92,52%	0	0%
2)	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	dokumen	100.000	100	155.207.872	1	150.888.600	1	135.840.900	100%	90,03%	1	100%
3)	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	40	orang	100.000	8	41.083.500	40	122.560.200	40	119.027.000	100%	97,12%	40	100%
4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang disusun	1	dokumen	100.000	4	8.051.320	1	9.999.250	1	9.501.440	100%	95,02%	1	100%
1)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1	dokumen	100.000	4	8.051.320	1	9.999.250	1	9.501.440	100%	95,02%	1	100%

Tabel 2.2
Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2023

NO.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
		Target	Realisasi	Capaian
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	22.833.556.026	20.790.939.403	91,05%
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	134.863.150	125.364.880	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.464.600	56.852.220	97,24%
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.398.550	68.512.660	89,68%
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.185.492.269	9.179.430.317	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.625.323.269	8.655.803.397	89,93%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	560.169.000	523.626.920	93,48%
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000	49.905.300	
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	49.905.300	99,81%
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.475.400	41.385.240	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.475.400	41.385.240	81,99%
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.229.685.900	3.071.845.678	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.505.800	47.498.010	99,98%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	458.697.220	442.620.000	96,50%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.251.700	34.170.250	99,76%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.702.160	60.657.810	99,93%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	424.139.500	347.754.850	81,99%
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	931.861.520	881.713.506	94,62%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.272.528.000	1.257.431.252	98,81%
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	518.738.864	509.053.500	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	328.500.900	327.120.000	99,58%

NO.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
		Target	Realisasi	Capaian
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	132.070.924	130.429.500	98,76%
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.167.040	51.504.000	88,54%
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.983.032.853	2.799.152.685	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.996.250	19.571.000	97,87%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	989.526.052	943.880.686	95,39%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	307.726.700	277.222.126	90,09%
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.665.783.851	1.558.478.873	93,56%
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.333.355.060	1.285.068.364	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	478.410.000	478.391.475	100,00%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	483.450.000	457.418.685	94,62%
3	Pemeliharaan Mebel	40.000.000	39.622.000	99,06%
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.490.000	19.456.000	99,83%
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	147.075.060	128.093.764	87,09%
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	24.057.280	96,23%
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	139.930.000	138.029.160	98,64%
IX	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	500.031.520	479.158.000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	11.340.000	8.090.000	71,34%
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	86.191.520	85.818.000	99,57%
3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.500.000	-	0,00%

NO.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
		Target	Realisasi	Capaian
4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	385.250.000	96,31%
X	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	635.358.910	408.408.957	
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	540.461.280	328.076.143	60,70%
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	94.897.630	80.332.814	84,65%
XI	Penataan Organisasi	569.426.250	564.333.868	
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	263.429.300	262.376.028	99,60%
2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	186.343.700	184.780.310	99,16%
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	119.653.250	117.177.530	97,93%
XII	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.643.095.850	2.277.832.614	
1	Fasilitasi Keprotokolan	138.155.710	106.804.500	77,31%
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2.172.704.250	1.867.811.674	85,97%
3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	332.235.890	303.216.440	91,27%
B	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	5.365.753.600	5.069.196.067	94,47%
I	Administrasi Tata Pemerintahan	1.444.527.230	1.402.290.518	
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	666.696.850	642.794.773	96,41%
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	351.741.680	350.469.795	99,64%
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	426.088.700	409.025.950	96,00%
II	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3.335.574.730	3.226.869.799	
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	956.318.390	899.319.030	94,04%
2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	2.138.554.700	2.102.759.364	98,33%
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	240.701.640	224.791.405	93,39%
III	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	408.063.970	281.177.770	
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	93.359.170	86.241.900	92,38%

NO.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
		Target	Realisasi	Capaian
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	255.253.250	136.235.400	53,37%
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	59.451.550	58.700.470	98,74%
IV	Fasilitasi Kerjasama Daerah	177.587.670	158.857.980	
1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	170.633.320	152.214.980	89,21%
2	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	6.954.350	6.643.000	95,52%
C	Program Perekonomian Dan Pembangunan	568.042.690	526.041.717	92,61%
I	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	195.719.000	177.753.327	
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	79.999.600	78.866.870	98,58%
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	115.719.400	98.886.457	85,45%
II	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	62.563.940	59.574.550	
1	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	62.563.940	59.574.550	95,22%
III	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	299.760.500	279.212.400	
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	26.311.700	24.344.500	92,52%
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	150.888.600	135.840.900	90,03%
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	122.560.200	119.027.000	97,12%
IV	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	9.999.250	9.501.440	
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	9.999.250	9.501.440	95,02%
JUMLAH		28.767.352.316	26.386.177.187	91,72

Tabel 2.1 dan tabel 2.2 diatas sudah dapat menggambarkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh pada tahun 20223 melaksanakan 3 program dengan anggaran sebesar Rp. 28.767.352.316,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.386.177.187,- atau sebesar 91,72%. Terdapat beberapa Sub Kegiatan yang realisasi dibawah 70% sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, realisasi anggaran 0% disebabkan karena Intensitas kegiatan pimpinan yang padat sehingga Medical Check Up tertunda.

- b. Fasilitasi Bantuan Hukum, realisasi anggaran 53,37% disebabkan karena biaya penyelesaian masalah hukum menyesuaikan dengan tahapan/ proses kasus/ perkara yang dihadapi oleh Pemko Payakumbuh.
- c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, realisasi anggaran 60,70% disebabkan karena efesiensi anggaran yaitu pengadaan gorden/ vitrase tidak dilaksanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah, dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut:

(1) Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah membawahi:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
- c. Asisten Administrasi Umum

(2) Masing-masing Asisten membawahi:

A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 Bagian, terdiri dari:

1. Bagian Pemerintahan membawahi 3 Sub Bagian, terdiri dari

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemerintahan Umum
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Otonomi Daerah
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembinaan Wilayah

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 Sub Bagian, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bina Pendidikan Pariwisata, Pemudaran Olahraga
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bina Kesejahteraan Sosial
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keagamaan dan Budaya
 3. Bagian Hukum, membawahi 3 Sub Bagian, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perundang-undangan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Dokumentasi Hukum
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bantuan Hukum
- B. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahi 3 bagian, terdiri dari:
1. Bagian Perekonomian membawahi 3 Sub Bagian, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bina Produksi Daerah
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bina Pengembangan Ekonomi Daerah
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Kelembagaan Ekonomi Daerah
 2. Bagian PBJ dan Pengendalian Pembangunan membawahi 3 Sub Bagian, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi LPSE
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
 3. Bagian Perencanaan dan Anggaran membawahi 2 Sub Bagian, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan
- C. Asisten Administrasi Umum, membawahi 3 Bagian, terdiri dari :
1. Bagian Organisasi membawahi 3 Sub Bagian, terdiri dari
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kelembagaan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Tata Laksana
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kepegawaian dan Kinerja
 2. Bagian Umum membawahi 3 Sub Bagian, terdiri dari
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Umum
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perlengkapan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Rumah Tangga
- 3. Bagian Protokoler dan Dokumentasi membawahkan 3 Sub Bagian, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Protokoler
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Dokumentasi dan Informasi
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Tata Usaha Pimpinan
- D. Kelompok Jabatan Fungsional

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah

Mempunyai tugas membantu Walikota dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintahan daerah, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas Sekretariat Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja sekretariat sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD)
- b. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota
- c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pengaturan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Staf Ahli dilingkungan Pemerintah Kota dan Kecamatan
- d. Penyelenggaraan pembinaan teknis administratif kepada Inspektorat
- e. Penyelenggaraan tugas lain dari Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan pendidikan, kesehatan, Sosial, Tramtibum dan Linmas, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perpustakaan, Kearsipan, Keagamaan, Kecamatan dan Penyusunan produk hukum, pemberian bantuan hukum serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga;
- h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- i. Kecamatan.

Fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Asisten mengacu pada rencana strategis Sekretariat Daerah.
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pendidikan, kesehatan, sosial, tramtibus dan linmas, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan, kearsipan, keagamaan, kecamatan, penyusunan produk hukum, pemberian bantuan hukum.
- c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian pemantauan dan evaluasi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tramtibus dan linmas, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan, kearsipan, keagamaan, kecamatan, penyusunan produk hukum, pemberian bantuan hukum.
- d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, penanaman modal dan PTSP, Koperasi dan UMKM, Perdagangan, Perindustrian Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Transmigrasi, Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan

Informasi, Statistik, Persandian, BUMD/Perbankan serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi :

- a. Dinas Ketahanan Pangan;
- b. Dinas Pertanian;
- c. Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- d. Dinas Koperasi dan UKM;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- f. Dinas Perhubungan;
- g. Dinas PU dan Penataan Ruang;
- h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- i. Dinas Komunikasi dan Informasi;
- j. Dinas Lingkungan Hidup.

Fungsi Asisten Ekonomi dan Pembangunan sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Asisten mengacu pada rencana strategi Sekretariat Daerah
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, penanaman modal dan PTSP, Koperasi dan UMKM, Perdagangan, Perindustrian Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Transmigrasi, Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian, BUMD/Perbankan
- c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian pemantauan dan evaluasi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, penanaman modal dan PTSP, Koperasi dan UMKM, Perdagangan, Perindustrian Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Transmigrasi, Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian, BUMD/Perbankan
- d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

4. Asisten Administrasi Umum

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan organisasi dan ketatalaksanaan, pelayanan publik, pelayanan interen, pelayanan barang dan jasa serta urusan penunjang

keuangan, perencanaan, kepegawaian dan diklat serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi :

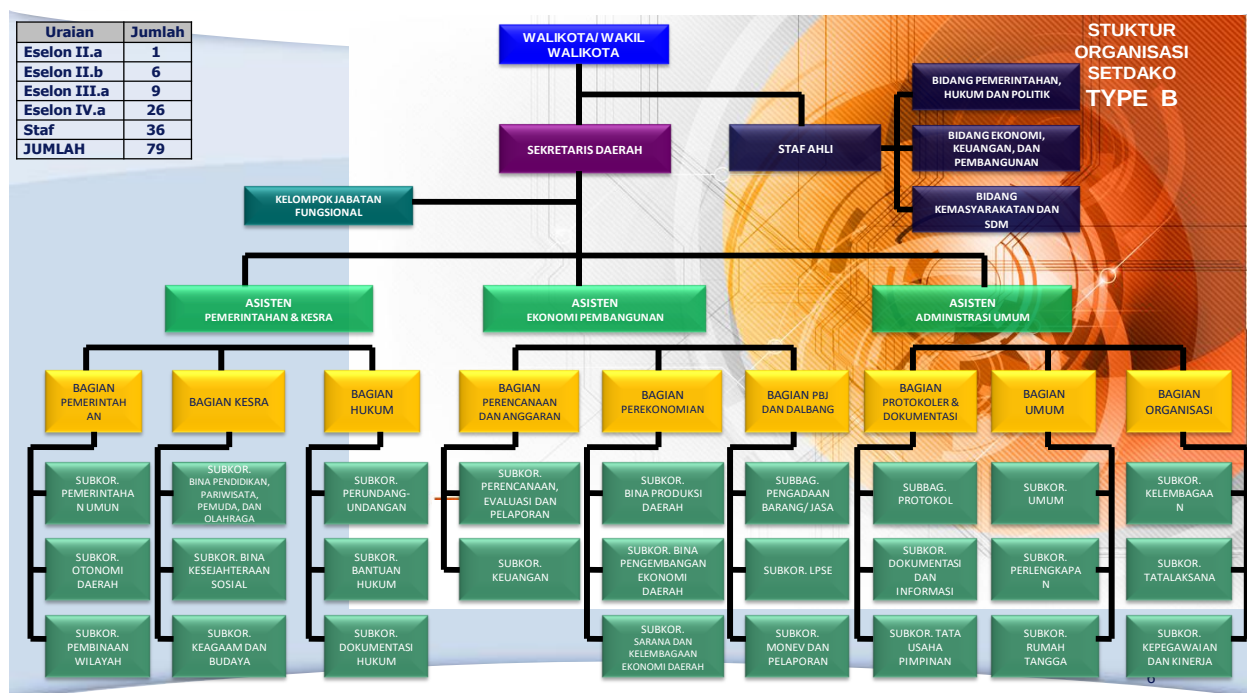
- a. Sekretariat DPRD;
- b. Inspektorat;
- c. BAPPEDA;
- d. Badan Keuangan Daerah;
- e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Kantor KesbangPol

Fungsi Asisten Administrasi Umum sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Asisten mengacu pada rencana strategis Sekretariat Daerah
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum pada urusan organisasi dan ketatalaksanaan, pelayanan publik, pelayanan interen, pelayanan barang dan jasa serta urusan penunjang keuangan, perencanaan, kepegawaian dan diklat serta pengkoordinasian perangkat daerah dilingkup tugasnya
- c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan organisasi dan ketatalaksanaan, pelayanan publik, pelayanan interen pelayanan barang dan jasa serta urusan penunjang keuangan, perencanaan, kepegawaian dan diklat serta pengkoordinasian perangkat daerah dilingkup tugasnya
- d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, dapat digambarkan Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan SOTK Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh



Berdasarkan penetapan kinerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh mempunyai indikator kinerja pelayanan, sebagaimana terlihat pada tabel 2.3

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 2 (dua) indikator sasaran Sekretariat Daerah yang ditargetkan ditahun 2023 secara umum telah tercapai, antara lain indikator yang tercapai melebihi target yang telah ditetapkan seperti Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai dengan indeks 89,65 dari 88,41 yang ditargetkan, dengan persentase sebesar 89,62%. Sedangkan nilai LPPD tahun 2023 dengan target sebesar 3,1700 tercapai dengan nilai 3,3922 berdasarkan atas Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Kepmendagri nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun 2022.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang perlu dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Berdasarkan pada uraian permasalahan diatas, maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh adalah:

Bagian Pemerintahan:

1. Belum dilaksanakannya pemasangan pilar batas antara Kota Payakumbuh dengan Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Belum tergambarnya secara administrasi batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Payakumbuh
3. Belum optimalnya kapasitas pemahaman aparatur pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan terutama dengan perubahan-perubahan aturan dan kebijakan tentang Kecamatan dan Kelurahan

4. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah umum di Kota Payakumbuh
5. Belum optimalnya inventarisasi data rupa bumi di Kota Payakumbuh
6. Belum optimalnya pemahaman SKPD terhadap indikator kinerja kunci (IKK) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Bagian Kesra:

1. Penguatan Peran Lembaga Keagamaan LPTQ dan MUI Kecamatan.

Secara umum lembaga keagamaan sudah berperan lebih baik, namun ada beberapa lembaga yang sebenarnya peran dan fungsinya sangat diharapkan dalam pembinaan keagamaan ditengah masyarakat, namun selama ini cenderung mengalami kefakuman dan kurang berperan, diantaranya LPTQ dan MUI Kecamatan. sehingga disaat penyelenggaraan MTQ kita sangat kesulitan mencari kafilah yang berkualitas dari lembaga-lembaga pendidikan Al Quran yang ada di Kota Payakumbuh. Begitupun MUI Kecamatan se Kota Payakumbuh, juga belum dirasakan perannya di tengah masyarakat sebagi wadah koordinasi ulama dalam pembinaan ummat.

2. Peningkatan fungsi Masjid sebagai sarana pemberdayaan ummat.

Dua tahun terakhir masjid-masjid yang ada di Kota Payakumbuh cenderung mengeliat, hal ini dilihat dari peningkatan jumlah jamaah shalat fardhu, namun mencermati potensi yang ada diharapkan kedepannya peran masjid tidak hanya sebagai sarana ibadah semata, tetapi diharapkan masjid bisa dijadikan sebagai salah satu pusat pemberdayaan kegiatan umat islam, dengan indicator minimal sebagai berikut:

- a. Masjid Sebagai Sarana Ibadah

Dilihat dari peningkatan jumlah jamaah shallat fardhu terutama subuh dan peningkatan kegiatan wirid pengajian rutin/tabligh akbar yang terprogram dan dikelola dengan baik.

- b. Masjid Sebagai Sarana Pendidikan

Kedepannya seluruh masjid di Kota Payakumbuh memiliki lembaga pendidikan keagamaan seperti TPQ dan MDTA bahkan kalau memungkinkan memiliki lembaga pendidikan formal seperti TK Islam dan SD Islam. Selain itu juga diharapkan setiap masjid memiliki perhatian terhadap keberadaan remaja masjid dan pendidikan Al Quran pasca khatam.

- c. Masjid Sebagai Sarana Penguatan Ekonomi Ummat.

Kedepannya masjid juga diharapkan memiliki program yang terstruktur dan dikelola dengan baik untuk pemberantasan kemiskinan dan pengayoman anak yatim/piatu yang tidak hanya bersifat insidentil, melainkan berkesinambungan dan terarah. Untuk itu setiap masjid diharapkan memiliki unit pengelola zakat (UPZ) yang permanent, dengan struktur organisasi dan program kerja yang tertata dan tidak hanya focus pada pengelolaan Zakat Fitrah di bulan Ramadhan, melainkan juga Zakat Mal, Infaq, Sedekah dan Wakaf.

Bagian Hukum:

1. Masih adanya kasus-kasus yang terkait dengan Pemerintahan yang perlu dilakukan advokasi dan sosialisasi.
2. Koordinasi antara sesama Lembaga Penegak Hukum seperti Kejaksaan Negeri, Kepolisian, dan Lembaga Pengadilan dengan Pemerintah Kota Payakumbuh khususnya Bagian Hukum sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Sedangkan koordinasi antar lembaga sangat diperlukan untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum dan perlu penguatan koordinasi agar lebih optimal dan dicarikan solusinya secara komprehensif bersama stakeholder terkait. Koordinasi antara Lembaga Hukum dilakukan oleh Tim Advokasi yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota.

Kurangnya koordinasi antara Lembaga disebabkan masih kurangnya kuantitas pertemuan Tim Advokasi yang disebabkan karena kurangnya dana pendukung untuk melakukan pertemuan tersebut. Disamping itu, anggota Tim Advokasi belum melakukan tugas pokok dan fungsi secara maksimal

3. Pembentukan Tim Pembahasan Ranperda
Tim yang bertugas membahas Perda sebelum dilimpahkan ke DPRD baik secara kuantitas maupun kualitas masih terbatas, untuk itu perlu dilakukan peningkatan yang lebih komprehensif dengan jalan, melakukan fasilitasi pembahasan perda dengan pihak Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat dan Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat

4. Masalah Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan
Jika dilihat dari resiko terhadap kegiatan yang dilakukan tidak seimbang dengan dana yang tersedia. Namun kegiatan ini berdampak terhadap hukum/ timbul masalah hukum terutama terhadap Keputusan Walikota yang dikaji. Apalagi Keputusan yang diterbitkan secara umum untuk melaksanakan APBD. Kendala lain yang dihadapi pada kegiatan ini adalah adanya beberapa SKPD yang tidak berkoordinasi dengan Bagian Hukum

- untuk menandatangani Produk Hukum yang dibuat sehingga ketika persoalan muncul adakalanya bagian hukum tidak mengetahui
5. Masalah dokumentasi hukum, melalui jaringan dokumentasi informasi hukum, (JDIH) Bagian Hukum Kota Payakumbuh telah mendapat penghargaan dari Kemenkumham sebagai pengelola JDIH terintegrasi. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Untuk itu pada tahun-tahun mendatang perlu optimalisasi pelaksanaan dan pemanfaatan JDIH sebagai pusat informasi hukum melalui jaringan/ online yang dapat diperoleh oleh masyarakat atau SKPD setiap membutuhkan

Bagian Perekonomian:

1. Sering terjadinya kelangkaan BBM (Bensin,Solar,Pertamax) serta LPG 3 KG yang disebabkan oleh terganggunya pasokan dari PT. Pertamina, adanya spekulasi LPG 3 KG ditingkat pangkalan dan agen sehingga tidak tepat sasaran sampai ke konsumen
2. Dibidang Ketenagalistrikan masih banyaknya bangunan milik Pemerintah, Fasilitas Umum dan Milik Masyarakat yang instalasi listriknya sudah berusia diatas 15 tahun yang bisa berakibat menimbulkan kebakaran karena sudah tidak layak operasi.
3. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD sektor ekonomi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan bidang ekonomi di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
4. Masih terbatasnya pemasaran hasil produk UMKM di Kota Payakumbuh, sehingga perkembangan kegiatan usaha sektor ini kurang memberikan nilai tambah bagi perekonomian Kota Payakumbuh.
5. Rendahnya tingkat interaksi langsung antara pelaku usaha, pembeli dan pemerintah dalam memasarkan produk yang dihasilkan dan produk unggulan Kota Payakumbuh kurang dikenal.
6. Masih kurangnya informasi yang terpublikasi ke masyarakat tentang Perkembangan Produksi Daerah Sektor Ekonomi yang di Kota Payakumbuh.
7. Belum maksimalnya pengkajian dan analisa produksi daerah sektor ekonomi yang menghasilkan data valid sebagai dasar pembuatan kebijakan bidang ekonomi.
8. Mengendalikan harga pada level rendah dan stabil melalui berbagai kebijakan pengendalian inflasi
9. Perlu adanya data yang valid dan terintegrasi terutama data produksi dan data kebutuhan konsumsi di Kota Payakumbuh sehingga bisa diketahui

- ketersediaan pasokan yang digunakan dalam rangka merumuskan kebijakan pengendalian inflasi yang akan diambil
10. Perlu adanya kerjasama perdagangan antar daerah dalam rangka mencukupi pasokan pangan
 11. Interaksi dan Koordinasi dengan lembaga non pemerintah merupakan suatu yang sangat penting dalam mewujudkan suatu perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodir semua kepentingan masyarakat
 12. Perlu adanya suatu lembaga yang bisa dijadikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah, salah satunya melalui pembentukan BUMD di Kota Payakumbuh
 13. Tujuan pembentukan BUMD bukan hanya *profit oriented* namun juga mengedepankan aspek sosial kemasyarakatan

Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Pengendalian Pembangunan

1. Masih rendahnya kesadaran pengelola kegiatan terhadap tugas dan tanggung jawabnya
2. Masih rendahnya pemahaman pengelola kegiatan terhadap pelaksanaan tertib administrasi pembangunan dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh
3. Dibutuhkan biaya operasional untuk pelaksanaan penyelenggaraan unit pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) agar pelaksanaan e-procurement di Kota Payakumbuh dapat berjalan optimal
4. Dibutuhkan biaya operasional untuk pelaksanaan penyelenggaraan unit pengelolaan pengadaan barang/jasa yang akan melaksanakan pengadaan barang/ jasa di Kota Payakumbuh
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Pokja Unit Pengadaan Barang/ Jasa terkait peralihan status pokja menjadi fungsional tertentu dan perubahan peraturan tentang pengadaan.

Bagian Perencanaan dan Anggaran:

1. Belum optimalnya koordinasi masing-masing bagian dalam hal mengumpulkan bahan perencanaan, keuangan dan evaluasi dan pelaporan.
2. Rendahnya pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsinya disebabkan minimnya diklat-diklat fungsional.
3. Kurangnya kuantitas sumber daya aparatur, berakibat kepada rangkap jabatan dan lambatnya penyelesaian tugas.

Bagian Organisasi :

1. Belum optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mulai dari perencanaan kinerja, penetapan kinerja,

- pengukuran kinerja, hingga evaluasi kinerja yang dikarenakan perbedaan pemahaman dan persepsi diantara unsur pemerintah daerah dan belum terintegrasinya sistem aplikasi perencanaan, keuangan dan pelaporan
2. Ketersediaan sumberdaya manusia aparatur yang memiliki kompetensi masih minim. Hal tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kapabilitas dan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan.
 3. Pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsinya masih belum optimal. Sehingga menyebabkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran SKPD tidak optimal.
 4. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan (SP), SOP di masing-masing Perangkat Daerah sehingga mempengaruhi nilai Survey Kepuasan Masyarakat
 5. Kelembagaan Perangkat Daerah yang ada saat ini masih belum optimal dalam mewujudkan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran, masih banyak tipe perangkat daerah yang tidak sesuai dengan beban tugas yang diemban, permasalahan kelembagaan rumah sakit yang masih menunggu Pepres, kelembagaan Kesbangpol yang belum jelas dan masalah terkait kelembagaan lainnya
 6. Belum optimalnya pelaksanaan Anjab, ABK dan Evjab sehingga belum cukup untuk dijadikan dasar yang valid untuk manajemen kepegawaian mulai dari perencanaan pegawai, rekrutmen, manajemen karir, diklat, hingga penilaian dan pemberian tunjangan kinerja atau remunerasi
 7. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di Kota Payakumbuh.

Bagian Umum:

1. Aspek Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik merupakan hal penting seiring tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari Pemerintah. Pelayanan yang diberikan bagian umum yakni persuratan beserta distribusinya, transportasi untuk kedinasan maupun masyarakat, pemakaian ruangan beserta fasilitasnya serta pelayanan pada rumah dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah. Oleh sebab itu, Bagian Umum akan terus meningkatkan pelayanan untuk menunjang kinerja pemerintah

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Dari segi kualitas SDM yang tersedia tidak sebanding dengan beban tugas bagian umum yang cukup besar dan luasnya ruang lingkup pekerjaan.

Luasnya lingkup pekerjaan bagian umum menuntut tersedianya tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan atau skill khusus seperti teknisi maupun tenaga administrasi. Dari segi jumlah SDM yang dimiliki bagian umum masih kurang, yang mana pada kegiatan tertentu sering terjadi rangkap pekerjaan

3. Aspek Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana maupun peralatan dan perlengkapan yang dikuasai bagian umum untuk kebutuhan kantor dan ruang dinas masih terbatas dari segi jumlah dan kualitas. Permasalahan juga muncul dari segi pemeliharaan sarana dan prasarana serta peralatan dan perlengkapan tersebut karena terbatasnya dana pendukung.

Bagian Protokoler dan Dokumentasi :

Ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dibidang protokoler masih minim. Hal tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kapabilitas dan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh yang berkaitan dengan pelayanan kepada Perangkat Daerah pada tatanan kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas tata kelola dan kelembagaan perangkat daerah.

Tata kelola dan kelembagaan perangkat daerah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena untuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, mesti memperbaiki kelembagaan masing-masing perangkat daerah terlebih dahulu.

Dengan adanya tuntutan dari pemerintah pusat untuk penyederhanaan birokrasi, maka pemerintah daerah harus siap untuk membenahi kelembagaan dan birokrasi dibawahnya sehingga akan tercipta tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas.

2. Belum optimalnya akuntabilitas dan kualitas pelaporan pemerintah daerah.

Kualitas pelaporan pemerintahan daerah yang belum optimal dikarenakan terdapatnya beberapa indikator-indikator pelaporan yang belum tercantum dalam dokumen perencanaan sehingga dalam masa pelaporan data yang dibutuhkan tidak dapat disajikan dalam dokumen pelaporan.

3. Belum optimalnya pelayanan hukum sesuai dengan kewenangan daerah.
Kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengartikan sejauh mana peran dan kewenangan pemerintah daerah untuk masalah pelayanan hukum.
4. Belum optimalnya fasilitasi pengendalian inflasi daerah
Belum optimalnya pengambilan langkah-langkah kebijakan perekonomian untuk pengendalian laju inflasi daerah saat dan setelah Pandemi Covid-19.
5. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum
Penyelenggaraan pemerintahan umum pada kecamatan dan kelurahan yang masih belum optimal sehingga perlu menjadi perhatian oleh pemerintah daerah di atasnya karena kecamatan dan kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan.
6. Belum optimalnya pelayanan publik perangkat daerah
Dengan perkembangan teknologi pada saat ini dan kedepannya perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan pada kinerja pelayanan masing-masing perangkat daerah baik dari segi sumber daya manusia dan infrastruktur pelayanan.
7. Belum optimalnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Mekanisme pengadaan barang dan jasa sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku namun dalam proses pelaksanaannya masih perlu dioptimalkan baik dari proses awal perencanaan maupun pelaksanaan fisik pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran. Selain itu dengan adanya program pemerintah dalam pembagian proporsi pemakaian produksi dalam negeri sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyikapinya melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa dari awal proses pengadaan.
8. Belum optimalnya pengendalian administrasi pembangunan
Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam bidang pengendalian administrasi pembangunan, sehingga perlu dilaksanakan sosialisasi terkait tertibnya pengendalian administrasi pembangunan
9. Belum optimalnya pengelolaan lembaga dan pengamalan agama
Perlunya dilakukan perbaikan terhadap kepengurusan dari lembaga keagamaan sehingga dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan dapat dirasakan manfaatnya ditengah masyarakat.

10. Belum optimalnya kualitas pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Perlunya ditingkatkan kualitas pelayanan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah antara lain :

1. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
2. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Kota Payakumbuh adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah;
3. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti oleh peraturan yang jelas.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Payakumbuh pada tahun 2023-2026 yang tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Oleh karena itu yang menjadi isu strategis Sekretariat Daerah dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2025 adalah “Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan”

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 ditemukan beberapa perbedaan dengan kebutuhan anggaran Sekretariat Daerah tahun 2025. Hal ini disebabkan karena terdapat kebutuhan mendasar antara lain :

1. Terkait dengan kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah definitif seperti pengadaan kendaraan jabatan, kebutuhan rumah tangga KDH/ WKDH;
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Rumah Dinas KDH/ WKDH;
3. Penambahan anggaran untuk pemenuhan Hibah Masjid/ Musalla dan lembaga keagamaan lainnya.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dan perubahannya dapat dilihat pada tabel 2.4. dibawah ini:

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2025
KOTA PAYAKUMBUH

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pendukung				25.661.526.737	Urusan Pendukung				31.708.482.737	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai IKM	88,6	22.672.994.740	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai IKM	88,6	27.393.538.487	
			Nilai Evaluasi AKIP SETDAKO oleh Inspektorat	A				Nilai Evaluasi AKIP SETDAKO oleh Inspektorat	A		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja program/ kegiatan	100%	99.394.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja program/ kegiatan	100%	99.394.050	
			IKM Sekretariat Daerah	89				IKM Sekretariat Daerah	89		
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	53.197.300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	16.812.300	
2)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	46.197.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	82.581.750	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	90%	11.167.197.096	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	90%	11.157.319.696	
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 orang/bulan	10.607.197.096	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 orang/bulan	10.607.197.096	
2)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	560.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	550.122.600	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	100%	20.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	100%	50.000.000	
1)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	20.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	50.000.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	52.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	71.000.000	
1)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	82 paket	52.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	71 paket	71.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan umum Sekretariat Daerah sesuai standar	100%	2.173.003.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan umum Sekretariat Daerah sesuai standar	100%	2.797.540.200	
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 paket	34.988.750	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 paket	34.985.000	
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 paket	99.996.000	
3)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 paket	30.225.450	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 paket	69.743.000	
4)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 paket	39.448.050	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 paket	39.448.050	
5)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 dokumen	424.136.100	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 dokumen	424.123.150	
6)	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	689.651.350	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	889.697.000	
7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 laporan	939.554.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 laporan	1.239.548.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	90%	345.200.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	90%	3.394.721.963	
1)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	100.000			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	1.600.000.000	
2)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	100.000			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	1.350.000.000	
3)	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan	6 paket	100.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan	6 paket	199.835.675	
4)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	45.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	44.898.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau angunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau angunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	99.998.388	
6)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	99.989.900	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	2.813.527.050	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	2.965.786.014	
1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	941.040.850	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	941.039.294	
2)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	199.997.200	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	391.790.000	
3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1.672.489.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1.632.956.720	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90%	1.028.970.424	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90%	1.739.949.100	
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	478.410.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	612.180.000	
2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 unit	448.550.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 unit	754.140.000	
3)	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 uniit	10.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 uniit	9.977.500	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 uniit	12.620.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 uniit	12.210.000	
5)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	29.990.424	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	233.721.600	
6)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	25.000.000	
7)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	24.400.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	92.720.000	
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan kepada KDH dan WKDH	100%	1.431.330.720	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan kepada KDH dan WKDH	100%	1.456.024.664	
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	983.234.960			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	984.905.144	
2)	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 paket	43.095.760	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 paket	66.119.520	
3)	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 orang	5.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 orang	5.000.000	
4)	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	400.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	400.000.000	
9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan baik	100%	771.348.850	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan baik	100%	892.437.700	
1)	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	15 paket	426.455.350	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	15 paket	476.300.500	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2)	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	15 paket	250.000.000			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	15 paket	321.242.000	
3)	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	15 paket	94.893.500	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	15 paket	94.895.200	
10	Penataan Organisasi		Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah	39,09%	173.853.500	Penataan Organisasi		Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah	39,09%	173.853.150	
1)	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 dokumen	74.300.800	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 dokumen	74.300.700	
2)	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 laporan	60.449.900	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 laporan	60.449.700	
3)	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 dokumen	39.102.800	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 dokumen	39.102.750	
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik	100%	2.597.169.100	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik	100%	2.595.511.950	
1)	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	99.980.550	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	99.980.050	
2)	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 laporan	2.172.704.200	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 laporan	2.171.064.900	
3)	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	324.484.350	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	324.467.000	
II	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		Nilai LPPD	3.190	2.670.778.597	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		Nilai LPPD	3.190	3.987.838.900	
			Indeks Reformasi Hukum	74				Indeks Reformasi Hukum	74		
1	Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik	100%	651.059.300	Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik	100%	628.547.350	
			Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu	100%				Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu	100%		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1)	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 dokumen	232.353.600	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 dokumen	232.352.000	
2)	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 dokumen	63.888.950	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 dokumen	63.888.750	
3)	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 dokumen	354.816.750	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 dokumen	332.306.600	
2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	100%	1.618.960.747	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	100%	2.958.960.150	
1)	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 dokumen	559.138.750	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 dokumen	559.138.450	
2)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 dokumen	622.037.847	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 dokumen	1.962.037.700	
3)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 dokumen	437.784.150	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 dokumen	437.784.000	
3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	100%	387.758.700	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	100%	387.432.000	
			Persentase koordinasi hukum yang difasilitasi	100%				Persentase koordinasi hukum yang difasilitasi	100%		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1)	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3 dokumen	114.091.300	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3 dokumen	113.766.000	
2)	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	2 kasus	265.688.850	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	2 kasus	265.688.000	
3)	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah produk hukum dan pengelolaan produk hukum yang didokumentasikan	3 dokumen	7.978.550	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah produk hukum dan pengelolaan produk hukum yang didokumentasikan	3 dokumen	7.978.000	
4	Fasilitasi Kerjasama Daerah		Jumlah dokumen Kesepakatan Bersama/ Nota Kesepahaman yang difasilitasi	5 MoU/PKS	12.999.850	Fasilitasi Kerjasama Daerah		Jumlah dokumen Kesepakatan Bersama/ Nota Kesepahaman yang difasilitasi	5 MoU/PKS	12.899.400	
1)	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	1 dokumen	9.999.950	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	1 dokumen	9.946.000	
2)	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 laporan	2.999.900	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 laporan	2.953.400	
III	Program Perekonomian Dan Pembangunan		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	77	317.753.400	Program Perekonomian Dan Pembangunan		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	77	327.105.350	
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	100%	97.032.700	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	100%	97.032.150	
1)	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 dokumen	32.499.300	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 dokumen	32.499.000	
2)	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 laporan	64.533.400	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 laporan	64.533.150	
2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase hasil monitoring evaluasi yang ditindaklanjuti	100%	18.603.650	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase hasil monitoring evaluasi yang ditindaklanjuti	100%	18.603.350	
1)	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	18.603.650	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	18.603.350	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik	100%	198.617.550	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik	100%	198.616.750	
			Jumlah pembinaan dan pendampingan advokasi pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan	4 kali				Jumlah pembinaan dan pendampingan advokasi pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan	4 kali		
1)	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 dokumen	26.246.150	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 dokumen	26.245.900	
2)	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 dokumen	150.888.450	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 dokumen	150.888.000	
3)	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	40 orang	21.482.950	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	40 orang	21.482.850	
4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang disusun	1 dokumen	3.499.500	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang disusun	1 dokumen	12.853.100	
1)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 dokumen	3.499.500	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 dokumen	12.853.100	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat Daerah merupakan unsur pendukung kesekretariatan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Masyarakat selaku pengguna layanan yang diselenggarakan pemerintah daerah seyogyanya tidak hanya menjadi objek layanan tetapi juga menjadi aktor, bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan standar pelayanan disetiap unit pelayanan merupakan amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik.

Sekretariat Daerah telah mendesain beberapa kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, mulai dari penerapan standarisasi pelayanan, pengukuran kinerja pelayanan serta evaluasi kinerja pelayanan publik disetiap perangkat daerah dan unit pelayanan

Terkait dengan program dan kegiatan yang terlampir tidak ada terdapat usulan Musrenbang terkait dengan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh sebagaimana terlampir pada Tabel 2.5. Persandingan daftar kegiatan prioritas hasil musrenbang kecamatan tahun 2025 dengan Renja Perangkat Daerah.

TABEL 2.5
PERSANDINGAN DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2025 DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

HASIL MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2025					KEGIATAN SESUAI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		
NO	KEGIATAN PRIORITAS	LOKASI (KELURAHAN)	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	KEGIATAN RANCANGAN RENJA TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF TAHUN 2025	CATATAN PENTING
	NIHIL						

TABEL 2.6
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KOTA PAYAKUMBUH

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

**USULAN PROGRAM / KEGIATAN YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
SUMBER DANA APBN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DAERAH

NO	PRIORITAS NASIONAL, PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	OUT PUT (PROYEK) K/L	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	TARGET	USULAN PAGU	LOKASI		KET
								PROVINSI	KAB/KOTA	
	NIHIL									

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good governance* dan akuntabilitas publik.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tahun 2025 telah mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka dapat digambarkan Interkoneksi Prioritas Daerah Kota Payakumbuh dengan Prioritas Nasional sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Interkoneksi Prioritas Daerah Kota Payakumbuh dengan Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Sasaran Nasional	Prioritas Kota Payakumbuh	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target Kinerja 2025
1.	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	- Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel - Meningkatkan pelayanan publik yang prima	- Nilai Evaluasi AKIP Kota - Indeks pengelolaan keuangan daerah - Indeks SPBE - Indeks kepuasan masyarakat	A (81) 78 3,19 89,80

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya keselarasan antara Prioritas Nasional dengan Prioritas Kota Payakumbuh, dimana Sasaran Nasional yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan

penyelundupan.diturunkan menjadi prioritas Kota Payakumbuh yakni Peningkatan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas. Khusus Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh hanya mengampu indikator sasaran “Indek Kepuasan Masyarakat”yang dicantumkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Payakumbuhsedangkan indikator kinerja lainnya menjadi Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan sebagai turunan visi dan misi Sekretariat Daerah yang terkait erat dengan tugas yaitu:

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel

Sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran yang rinci yang harus dipenuhi dalam waktu satu tahun sehingga dapat menjamin keberhasilan rencana jangka menengah dan jangka panjang.

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penerapan regulasi baru dalam sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Maka untuk tahun anggaran 2024, Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2024 tertuang dalam 3 (tiga) Program, 20 (dua puluh) Kegiatan dan 60 (enam puluh) Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrai Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrai Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrai Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - c. Penyediaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan;
 - f. Fasilitasi kunjungan tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pengadaan Mebel
 - d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Pemeliharaan Mebel
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - c. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - d. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 10. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- 11. Penataan Organisasi
 - a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - b. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- 12. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - a. Fasilitasi Keprotokolan
 - b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan
- II. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 Kegiatan :
 - 1. Administrasi dan Tata Pemerintahan
 - a. Penataan Administrasi Pemerintahan;
 - b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan;
 - c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.
 - 2. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
 - c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
 - 3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - b. Fasilitasi Bantuan Hukum;
 - c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.
 - 4. Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - a. Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri;
 - b. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.

III. Program Perekonomian dan Pembangunan

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
 - b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.
2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - a. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 - c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.

Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran, indikator dan target capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
SUMBER DANA APBD KOTA PAYAKUMBUH

NO	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Pendukung				31.708.482.737				22.266.760.938
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM		88,60	27.393.538.487	DAU		88,80	19.421.761.148
		Nilai Evaluasi AKIP SETDAKO oleh Inspektorat		A				A	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program/ kegiatan		100%	99.394.050	DAU		100%	123.000.000
		IKM Sekretariat Daerah		89				90	
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 dokumen	16.812.300			4 dokumen	53.000.000
2)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 laporan	82.581.750			4 laporan	70.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan		90%	11.157.319.696	DAU		95%	9.315.910.801
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		78 orang/bulan	10.607.197.096			84 orang/bulan	8.755.910.801
2)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		12 dokumen	550.122.600			12 dokumen	560.000.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik		100%	50.000.000	DAU		100%	50.000.000
1)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 dokumen	50.000.000			1 dokumen	50.000.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	71.000.000	DAU		100%	100.000

NO	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		82 paket	71.000.000			84 paket	100.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum Sekretariat Daerah sesuai standar		100%	2.797.540.200	DAU		100%	1.185.814.950
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		9 paket	34.985.000			9 paket	20.000.000
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang disediakan		5 paket	99.996.000			5 paket	25.000.000
3)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		20 paket	69.743.000			20 paket	30.000.000
4)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		3 paket	39.448.050			3 paket	60.714.950
5)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3 dokumen	424.123.150			3 dokumen	100.000
6)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 laporan	889.697.000			1 laporan	400.000.000
7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		144 laporan	1.239.548.000			144 laporan	650.000.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor		90%	3.394.721.963	DAU		90%	40.400.000
1)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		2 unit	1.600.000.000			2 unit	100.000
2)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		3 unit	1.350.000.000			3 unit	100.000

NO	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3)	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan		6 paket	199.835.675			6 paket	100.000
4)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 unit	44.898.000			2 unit	39.900.000
5)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan		4 unit	99.998.388			4 unit	100.000
6)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		4 unit	99.989.900			4 unit	100.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan		100%	2.965.786.014	DAU		100%	3.150.000.000
1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 laporan	941.039.294			1 laporan	900.000.000
2)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 laporan	391.790.000			1 laporan	150.000.000
3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan		1 laporan	1.632.956.720			1 laporan	2.100.000.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		90%	1.739.949.100	DAU		90%	1.379.050.000
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		15 unit	612.180.000			15 unit	601.400.000

NO	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		45 unit	754.140.000			45 unit	397.650.000
3)	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		10 uniit	9.977.500			10 uniit	40.000.000
4)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 uniit	12.210.000			10 uniit	15.000.000
5)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 unit	233.721.600			4 unit	200.000.000
6)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 unit	25.000.000			4 unit	25.000.000
7)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 unit	92.720.000			4 unit	100.000.000
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepada KDH dan WKDH		100%	1.456.024.664	DAU		100%	637.469.807
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 orang/bulan	984.905.144			2 orang/bulan	182.469.807
2)	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		5 paket	66.119.520			5 paket	50.000.000
3)	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		4 orang	5.000.000			4 orang	5.000.000

NO	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4)	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 orang/bulan	400.000.000			2 orang/bulan	400.000.000
9	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase pelayanan kerumahtangaan Sekretariat Daerah dengan baik		100%	892.437.700	DAU		100%	673.517.120
1)	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		15 paket	476.300.500			15 paket	400.000.000
2)	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		15 paket	321.242.000			15 paket	200.000.000
3)	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		15 paket	94.895.200			15 paket	73.517.120
10	Penataan Organisasi	Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah		39,09%	173.853.150	DAU		39,09%	486.498.470
1)	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		1 dokumen	74.300.700			1 dokumen	166.537.490
2)	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		1 laporan	60.449.700			1 laporan	180.000.000
3)	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		2 dokumen	39.102.750			2 dokumen	139.960.980
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik		100%	2.595.511.950	DAU		100%	2.380.000.000
1)	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		12 laporan	99.980.050			12 laporan	140.000.000
2)	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		12 laporan	2.171.064.900			12 laporan	2.000.000.000
3)	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		12 laporan	324.467.000			12 laporan	240.000.000

NO	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD		3.190	3.987.838.900			3,200	2.194.999.820
		Indeks Reformasi Hukum		74				75	
1	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik		100%	628.547.350	DAU		100%	740.000.000
		Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu		100%				100%	
1)	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		1 dokumen	232.352.000			1 dokumen	280.000.000
2)	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		1 dokumen	63.888.750			1 dokumen	180.000.000
3)	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		5 dokumen	332.306.600			5 dokumen	280.000.000
2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat		100%	2.958.960.150	DAU		100%	660.000.000
1)	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		1 dokumen	559.138.450			1 dokumen	220.000.000
2)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		1 dokumen	1.962.037.700			1 dokumen	120.000.000

NO	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		1 dokumen	437.784.000			1 dokumen	320.000.000
3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi		100%	387.432.000	DAU		100%	509.999.820
		Persentase koordinasi hukum yang difasilitasi		100%				100%	
1)	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		3 dokumen	113.766.000			3 dokumen	99.999.820
2)	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		2 kasus	265.688.000			2 kasus	360.000.000
3)	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan porduk hukum yang didokumentasikan		3 dokumen	7.978.000			3 dokumen	50.000.000
4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen Kesepakatan Bersama/ Nota Kesepahaman yang difasilitasi		5 MoU/PKS	12.899.400	DAU		5 MoU/PKS	285.000.000
1)	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		1 dokumen	9.946.000			1 dokumen	165.000.000
2)	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		1 laporan	2.953.400			1 laporan	120.000.000
III	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa		77	327.105.350			78	649.999.970
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti		100%	97.032.150	DAU		100%	150.000.000

NO	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1)	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		1 dokumen	32.499.000			1 dokumen	70.000.000
2)	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		1 laporan	64.533.150			1 laporan	80.000.000
2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase hasil monitoring evaluasi yang ditindaklanjuti		100%	18.603.350	DAU		100%	40.000.000
1)	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		12 laporan	18.603.350			12 laporan	40.000.000
3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik		100%	198.616.750	DAU		100%	450.000.000
		Jumlah pembinaan dan pendampingan advokasi pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan		4 kali				4 kali	
1)	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		1 dokumen	26.245.900			1 dokumen	220.000.000
2)	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		1 dokumen	150.888.000			1 dokumen	160.000.000
3)	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		40 orang	21.482.850			40 orang	70.000.000
4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang disusun		1 dokumen	12.853.100	DAU		1 dokumen	9.999.970

NO	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan		1 dokumen	12.853.100			1 dokumen	9.999.970

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tahun 2025 terdiri dari beberapa 3 (tiga) Program, 20 (dua puluh) Kegiatan dan 60 (enam puluh) Sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 31.708.482.737,- yang mendukung pencapaian sasaran strategis Sekretariat Daerah tahun 2025. Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2025 diuraikan dalam tabel 4.1. sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH						31.708.482.737,00							22.545.860.938,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						31.708.482.737,00							22.545.860.938,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						31.708.482.737,00							22.545.860.938,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Sekretariat Daerah Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat	-			88,60 Indeks A Kategori	27.393.538.487,00						-	19.418.861.148,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKM Sekretariat Daerah Persentase capaian kinerja program/ kegiatan	-			89 nilai 100 %	99.394.050,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh	-	120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	16.812.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	82.581.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan</i>	-			90 %	11.157.319.696,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh	-	9.315.910.801,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				78 Orang/bulan	10.607.197.096,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		8.755.910.801,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	550.122.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		560.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	-			100 %	50.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh	-	50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	71.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh	-	100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				71 Paket	71.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase layanan umum Sekretariat Daerah sesuai standar</i>	-			100 %	2.797.540.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh	-	1.185.814.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				9 Paket	34.985.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	99.996.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	69.743.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	39.448.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		60.714.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	424.123.150,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	889.697.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				144 Laporan	1.239.548.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	-			90 %	3.394.721.963,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh	-	40.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	1.600.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	1.350.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	199.835.675,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	44.898.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	99.998.388,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	99.989.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	-			100 %	2.965.786.014,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh	-	3.150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	941.039.294,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	391.790.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.632.956.720,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		2.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	-			90 %	1.739.949.100,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh	-	1.379.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	612.180.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		601.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				45 Unit	754.140.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		397.650.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	9.977.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	12.210.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	233.721.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	25.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	92.720.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepada KDH dan WKDH	-			100 %	1.456.024.664,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh	-	637.469.807,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	984.905.144,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		182.469.807,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				5 Paket	66.119.520,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	5.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	400.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	<i>Persentase pelayanan kerumahtangaan Sekretariat Daerah dengan baik</i>	-			100 %	892.437.700,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh	-	673.517.120,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>				15 Paket	476.300.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				15 Paket	321.242.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				15 Paket	94.895.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		73.517.120,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah	-			39.09 %	173.853.150,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh	-	486.498.470,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	74.300.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		166.537.490,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	60.449.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	39.102.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		139.960.980,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik	-			100 %	2.595.511.950,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh	-	2.380.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	99.980.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	2.171.064.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	324.467.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		240.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD indeks reformasi hukum	-			3,1900 Nilai 74,00 Indeks	3.987.838.900,00						-	2.476.999.820,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu	-			100 % 100 %	628.547.350,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh	-	1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	232.352.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		740.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	63.888.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				5 Dokumen	332.306.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		280.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<i>Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat</i>	-			100 %	2.958.960.150,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh	-	660.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i>				1 Dokumen	559.138.450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1.962.037.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	437.784.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<i>Persentase koordinasi hukum yang difasilitasi</i> <i>Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi</i>	-			100 % 100 %	387.432.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh	-	509.999.820,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			<i>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun</i>				3 Dokumen	113.766.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		99.999.820,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				2 Kasus	265.688.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		360.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				3 Dokumen	7.978.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen Kesepakatan Bersama/ Nota Kesepahaman yang difasilitasi	-			5 MoU/PKS	12.899.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh	-	107.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	9.946.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama</i>				1 Laporan	2.953.400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<i>Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan jasa</i>	-			77 Indeks	327.105.350,00						-	649.999.970,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	<i>Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti</i>	-			100 %	97.032.150,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh	-	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	32.499.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	64.533.150,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase hasil monitoring evaluasi yang ditindaklanjuti	-			100 %	18.603.350,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh	-	40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	18.603.350,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pembinaan dan pendampingan advokasi pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik	-			4 kali 100 %	198.616.750,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh	-	450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	26.245.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	150.888.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				40 Orang	21.482.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang disusun	-			1 dokumen	12.853.100,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh	-	9.999.970,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	12.853.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh		9.999.970,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	JUMLAH							31.708.482.737,00							22.545.860.938,00		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025, merupakan dokumen rencana operasional pembangunan di Tahun 2025, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2025. Isi dari Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi *stakeholder* yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 baik dalam lingkup program, kegiatan dan sub kegiatan.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan bersama.
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Peran serta maksimal dari seluruh potensi *stakeholder* dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggungjawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh kedepannya.

Payakumbuh, 5 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si
NIP. 19680607 198809 1 001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jln. Veteran No. 70, Eks Lap. Poliko. Telp (0752) 92601, 92957 Fax (0752) 93279

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN : 2025
ANGGARAN

PROGRAM	Program Perekonomian dan Pembangunan
KEGIATAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
SUB KEGIATAN	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
KODE PROGRAM	4.01.03.

ANALISIS SITUASI

1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).

Sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) merupakan transformasi kelembagaan menjelaskan bahwa UKPBJ Barang/ Jasa agar mampu melaksanakan proses Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika Pengadaan Barang/ Jasa.

Pembinaan yang dilakukan dititikberatkan kepada sumber daya manusia di UKPBJ maupun Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa baik di Perangkat Daerah Kota Payakumbuh maupun Penyedia Barang/ Jasa. Pemerintah Kota Payakumbuh harus bisa mengantisipasi munculnya isu-isu yang berkaitan dengan perbedaan gender dalam hal keikutsertaan/partisipasi dalam proses pembangunan dan berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan adalah adanya persamaan hak dan kewajiban sesuai proporsi untuk mendapatkan masukan atau pengalaman pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender

Faktor Kesenjangan

Sumber daya laki-laki lebih diutamakan untuk dapat terlibat langsung dalam proses pengadaan barang/jasa dibandingkan sumber daya perempuan

Penyebab Internal

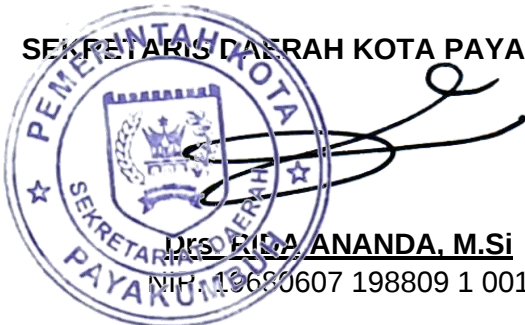
1. Belum pahamnya konsep Gender pada rekanan/penyedia;
2. Adanya kesenjangan SDM, laki-laki lebih banyak yang menduduki jabatan strategis pada perusahaan- perusahaan.

Penyebab Eksternal

1. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, bahwa gender adalah hanya sebatas mendahulukan perempuan saja;
2. Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal yang strategis seperti menjadi kepala keluarga,

	pimpinan perusahaan, tokoh masyarakat, dll 3. Hasil konstruksi sosial budaya yang membedakan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan terutama untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu		
CAPAIAN PROGRAM	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa		
JUMLAH ANGGARAN	Rp. 21.482.850,-		
RENCANA AKSI	Sub Kegiatan	Melaksanakan Pelatihan/ Sosialisasi Pengadaan Barang/ Jasa kepada seluruh pengguna dan penyedia barang/jasa di Kota Payakumbuh tanpa membedakan gender	
		Masukan	Rp. 21.482.850,-
		Keluaran	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; 2. Keikutsertaan kaum perempuan dalam Pelaksanaan Pelatihan/ Sosialisasi Pengadaan Barang/ Jasa bagi pengguna/ Penyedia Barang/ Jasa
		Hasil	1. Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik; 2. Meningkatnya keikutsertaan dan pemahaman kaum perempuan dalam proses pengadaan barang/ jasa serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



Drs. RISA ANANDA, M.Si
 NIP. 19680607 198809 1 001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jln. Veteran No. 70, Eks Lap. Poliko. Telp (0752) 92601, 92957 Fax (0752) 93279

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
Program : Perekonomian dan Pembangunan	Sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ)	Sumber daya laki-laki lebih diutamakan untuk dapat terlibat langsung dalam proses pengadaan barang/jasa dibandingkan sumber daya perempuan	1. Belum pahamnya konsep Gender pada rekanan/penyedia 2. Adanya kesenjangan SDM, laki-laki lebih banyak yang menduduki jabatan strategis pada perusahaan-perusahaan	1. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, bahwa gender adalah hanya sebatas mendahulukan perempuan saja; 2. Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal yang strategis seperti menjadi kepala keluarga, pimpinan perusahaan, tokoh masyarakat, dll 3. Hasil konstruksi sosial budaya yang membedakan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan terutama untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa	Melaksanakan sosialisasi Pengadaan Barang/ Jasa kepada seluruh pengguna dan penyedia barang/jasa di Kota Payakumbuh tanpa membedakan gender	input: Rp. 21.482.850,- output: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; outcomes: Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik;	input: Peserta Sosialisasi Pengadaan Barang/ Jasa output: Keikutsertaan kaum perempuan dalam Pelaksanaan Pelatihan/ Sosialisasi Pengadaan Barang/ Jasa bagi pengguna/ Penyedia Barang/ Jasa outcomes: Meningkatnya keikutsertaan dan pemahaman kaum perempuan dalam proses pengadaan barang/ jasa serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan
Kegiatan: Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	merupakan transformasi kelembagaan menjelaskan bahwa UKPBJ Barang/ Jasa agar mampu melaksanakan proses Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika Pengadaan Barang/ Jasa.							
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan yang dilakukan dititikberatkan kepada sumber daya manusia di UKPBJ maupun Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa baik di Perangkat Daerah Kota Payakumbuh maupun Penyedia Barang/ Jasa. Pemerintah Kota Payakumbuh harus bisa mengantisipasi munculnya isu-isu yang berkaitan dengan perbedaan gender dalam hal keikutsertaan/partisipasi dalam proses pembangunan dan berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan adalah adanya persamaan hak dan kewajiban sesuai proporsi untuk mendapatkan masukan atau pengalaman pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah.							
Tujuan : Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa								



SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

Drs. Rida ANANDA, M.Si

NIP. 19680607 198809 1 001

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Nilai LPPD	3,1900
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	88,60
		3. Indeks Pelayanan Publik	4,28

Payakumbuh, 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



Drs. RDA ANANDA, M.Si

NIP. 19680607 198809 1 001

